

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata berkelanjutan telah menjadi agenda global yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan diadopsi secara nasional melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Prinsip ini menegaskan bahwa pembangunan pariwisata tidak boleh lagi bertumpu pada eksploitasi sumber daya, melainkan pada keseimbangan ekonomi inklusif, kelestarian lingkungan, dan sosial-budaya. Destinasi yang berkelanjutan tidak hanya mementingkan pertumbuhan kunjungan, tetapi juga harus memastikan daya dukung ekosistem terjaga, masyarakat lokal berdaya, dan identitas budaya tetap lestari (UNWTO, 2018).

Meskipun demikian, dalam praktiknya pengembangan pariwisata di Indonesia masih belum sepenuhnya mampu menerapkan prinsip keberlanjutan secara menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dari Fenomena yang dijelaskan oleh Suardhana (2025) dalam bukunya yang berjudul “*Overtourism di Bali : Siapa yang Diuntungkan?, Siapa yang Tersisih?*”. Hasil Studi ini menegaskan bahwa pembangunan pariwisata Bali justru menghasilkan degradasi ekologis, identitas budaya, dan ketimpangan ekonomi akibat lemahnya tata kelola dan minimnya partisipasi komunitas dalam pengambilan keputusan. Kasus ini memperlihatkan kesenjangan nyata antara prinsip pariwisata berkelanjutan dan implementasinya di lapangan.

Berdasarkan studi dan fenomena tersebut, pola masalah ini mengindikasikan adanya kelemahan mendasar dalam paradigma pembangunan pariwisata. Hal ini dapat terjadi karena pengembangan pariwisata di Indonesia masih menggunakan pendekatan konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*growth-oriented tourism*) (Suardhana, 2025). Pendekatan yang bersifat *top-down* ini cenderung menempatkan masyarakat sebagai objek, mengabaikan kapasitas lokal, serta mengutamakan pembangunan fisik tanpa kajian daya dukung lingkungan (*physical carrying capacity*) yang memadai (Rachmawati & Fountain, 2020).

Akibatnya, pariwisata sering kali hanya menjadi penggerak ekonomi jangka pendek yang justru mengikis modal sosial dan merusak modal alam sebagai fondasi utama pariwisata berkelanjutan (Kushardianto et al., 2024).

Sebagai respons terhadap kelemahan pendekatan konvensional, pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) berkembang sebagai strategi pembangunan yang menekankan penguatan aset lokal dan partisipasi aktif masyarakat. Kretzmann & McKnight (1993) menjelaskan bahwa pendekatan ABCD memandang masyarakat bukan sebagai kelompok yang kekurangan, melainkan sebagai komunitas yang memiliki aset sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang dapat dimobilisasi. Dalam praktiknya, tahapan tersebut sering dioperasionalkan dalam lima tahap, yaitu *discovery*, *dream*, *design*, dan *deliver* (Salahuddin, 2015). Secara konseptual, pendekatan ini berpotensi mendorong pembangunan dari dalam (*inside-out development*), memperkuat rasa memiliki masyarakat, serta meningkatkan peluang tercapainya pariwisata berkelanjutan. Namun, keberhasilan pendekatan ABCD bergantung pada bagaimana penerapan setiap tahapan dan keterkaitannya dengan indikator keberlanjutan yang terukur.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, Pantai Gumuk Kantong di Muncar, Banyuwangi menawarkan contoh konkret bagaimana paradigma pengelolaan pendekatan ABCD. Pada tahun 2021, masyarakat mulai menyadari potensi kawasan pantai tersebut dan secara bertahap menginisiasi pengelolaan destinasi melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang kemudian didukung oleh kelompok lain seperti Pokmaswas dan Kelompok Usaha Bersama (KUB), dan berbagai pemangku kepentingan terkait (Kartimin et al., 2024). Setelah masyarakat memulai pengelolaan Pantai Gumuk Kantong secara mandiri, upaya tersebut kemudian diperkuat pada tahun 2023 melalui pendampingan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang berfokus pada pengoptimalan aset lokal dengan menggunakan pendekatan ABCD (Mumti'ah et al., 2023). Berbagai program berbasis aset lokal mulai dikembangkan, antara lain konservasi penyu dan tukik sebagai atraksi edukasi, pelestarian vegetasi pantai, penguatan kegiatan ekonomi masyarakat melalui UMKM lokal dan upaya pemaksimalan promosi melalui pemanfaatan media digital.

Akan tetapi, di balik kemajuan tersebut terdapat tanda-tanda bahwa penerapan pendekatan ABCD di Pantai Gumuk Kantong belum sepenuhnya optimal. Studi terdahulu Mumti'ah et al (2023) menyatakan bahwa hasil pendampingan penerapan pendekatan ini belum sepenuhnya berhasil karena masih ditemukannya kendala seperti partisipasi masyarakat yang belum merata dan pemanfaatan teknologi yang terbatas. Temuan pra-observasi peneliti di lapangan juga mencatat beberapa permasalahan seperti pengelolaan sampah belum maksimal yang dapat dilihat dari masih banyaknya sampah plastik akibat kegiatan wisata.

Temuan pra observasi tersebut menunjukkan kesenjangan antara prinsip-prinsip pendekatan ABCD dan hasil yang dicapai di lapangan, sehingga diperlukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap penerapan pendekatan tersebut dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Hingga saat ini belum ada evaluasi komprehensif yang menilai sejauh mana setiap tahapan ABCD berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian pariwisata berkelanjutan, khususnya pada dimensi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Sebagian penelitian terdahulu masih menitikberatkan pada proses identifikasi aset, pendampingan masyarakat, serta implementasi pendekatan ABCD dalam pengembangan destinasi wisata (Hikmah & Darwis, 2024; Mumti'ah et al., 2023; Warnadhani et al., 2025). Akibatnya, belum dapat dipastikan apakah penerapan ABCD di Pantai Gumuk Kantong benar-benar menghasilkan perubahan struktural dalam pengelolaan destinasi, atau hanya berhenti pada tahap identifikasi aset semata.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menggunakan *outcome evaluation*, yaitu pendekatan evaluasi yang berfokus pada penilaian terhadap perubahan atau hasil yang muncul setelah suatu program atau intervensi dilaksanakan (Patton, 2015). Melalui *outcome evaluation*, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bagaimana tahapan ABCD diterapkan di Pantai Gumuk Kantong, tetapi juga mengevaluasi capaian implementasinya berdasarkan indikator pariwisata berkelanjutan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan pariwisata. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas pendekatan ABCD dalam menghasilkan

perubahan yang mendukung pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) dalam pengembangan pariwisata di Pantai Gumuk Kantong Muncar?
2. Sejauh mana hasil penerapan pendekatan ABCD mendukung pencapaian pariwisata berkelanjutan dari aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan dengan menggunakan pendekatan *outcome evaluation*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu:

1. Menganalisis penerapan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) dalam pengembangan pariwisata di Pantai Gumuk Kantong Muncar pada setiap tahapan, yaitu *discovery*, *dream*, *design*, dan *deliver*.
2. Mengevaluasi hasil penerapan pendekatan ABCD terhadap pencapaian pariwisata berkelanjutan dari aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan berbasis *outcome evaluation*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan memperkaya pemahaman tentang pendekatan ABCD dengan memberikan bukti nyata mengenai pemanfaatan aset lokal dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan menunjukkan bagaimana tahapan ABCD, mulai *discovery*, *dream*, *design*, dan *deliver* dapat diterapkan secara efektif untuk meningkatkan keberlanjutan destinasi wisata di tingkat lokal.

Manfaat Praktis

1. Bagi Pengelola Destinasi Wisata

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan pengelolaan, terutama dalam memaksimalkan aset lokal dan memperkuat keberlanjutan.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berbasis Masyarakat dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pengembangan destinasi wisata yang berorientasi pada keberlanjutan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat membuka ruang penelitian lanjutan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kendala implementasi pendekatan ABCD di berbagai konteks destinasi wisata.